

News Title : Kripto Masuki Masa Transisi

Media Name : Bisnis Indonesia

Journalist : Anita W. Puspa, Rahmad Fauzan

Publish Date : 31 July 2023

Tonality : Positive

News Page : 3

News Value : 468,750,000

Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti), Eric Septian Wicaksono, (Direktur Utama Tennen Depositary), Andreas Eddy Susetyo (Anggota Komisi XI DPR)

Ads Value : 156,250,000

Section/Rubrication : Fokus

Topic : Bursa Kripto



| PENGEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN DIGITAL |

KRIPTO MASUKI MASA TRANSISI

Langkah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan yang mendirikan bursa kripto dengan membentuk lembaga klining dan pengelola penyimpanan aset kripto, memberi arah baru terhadap masa depan kripto sebagai aset investasi.

Anitana W. Puspa & Rahmad Fauzan
redaksi@bisnis.com

BISNIS Fokus

Selama 2 tahun terakhir, Indra menajali menyisihkan uangnya untuk berinvestasi di aset kripto. Pria berusia 42 tahun yang bekerja di salah satu perusahaan pengembang properti ternama di Indonesia itu, tergair setelah asasinya berhasil mengantongi untung hingga miliaran rupiah dari transaksi kripto.

Awalnya, Indra hanya melihat cara bosnya melakukan transaksi. Istilah menambang aset kripto, sering didengarnya. Sampai akhirnya, sang bos bisa mendapat gaji miliaran setelah adanya kenaikan aset kripto.

"Sangat saya telat kenal kripto," katanya saat berbincang dengan *Bisnis* di kawasan Satrio, Jakarta, belum lama ini. Sepanjang malam, dia mencoba 'meracuni' beberapa rekan yang beberapa kali berkumpul di tempat itu agar menjadi kan kripto sebagai alternatif pengembangan dana. Sebagian ada yang tertarik, tapi banyak di antaranya yang ragu.

Indra menyebut dirinya sebagai investor pemula di kripto. Dana yang ditempatkan tak lebih dari Rp10 juta. Sampai saat ini, dirinya masih bertahan dengan pilihan investasi di aset kripto.

"Lumayan, sehari-rapir margin Rp100.000-Rp200.000 buat jajan," katanya.

Akhir pekan lalu, Indra membagikan sebuah artikel terkait dengan pembentukan bursa kripto oleh Bappebti. Diskusi di grup media sosial pun ramai menanggapi artikel itu. Ada yang menilai positif, adanya bursa kripto dapat memberi kejelasan terhadap masa depan investasi kripto. Sebagian lagi, beranggapan bahwa bursa ini masih minim minat masyarakat untuk berinvestasi di aset kripto.

Tapi Indra memiliki perspektif yang berbeda. "Makin diatur, makin banyak 'foe'. Kena pajak," tulisnya di grup media sosial.

Situ hal lagi, dia beranggapan bahwa masa depan perdagangan di bursa kripto selepas berdirinya bursa tersebut akan berbeda dengan sekarang. Bayangan yang muncul di benaknya saat itu, operasional bursa kripto tak ubahnya bursa saham. Pagi dibuka, sore ditutup.

"Bursa tutup mengikis jam perdagangan kayak di BEI (Bursa Efek Indonesia). Enak sekarang, waktunya fleksibel 24 jam sehari selama 7 hari," ujarnya.

Indra mungkin satu di antara puluhan juta investor aset kripto yang saat ini masih meraba-raba masa depan investasi kripto di Tanah Air sejalan dengan hadirnya bursa kripto di bawah Bappebti. Berdasarkan data lembaga itu, jumlah masyarakat yang menjadikan aset kripto sebagai instrumen penempatan



Warga melintas di dekat ATM Bitcoin milik Coinhero, di Hong Kong.

dana, makin meningkat. Hingga Juni 2023, terdapat 17,54 juta pelanggan, naik hingga 57% dibandingkan dengan pelanggan pada 2021 sebanyak 11,2 juta.

Nilai transaksi aset kripto juga terbilang besar. Pada Januari-Juni 2023, nilai transaksi aset kripto Rp66,44 triliun. Pada 2021, transaksi kripto di Indonesia menyentuh Rp59,4 triliun. Lalu pada 2022 menyusut menjadi Rp296,66 triliun sejalan dengan runtuhnya sejumlah aset kripto di pasar pasar global. (*Lihat infografik*)

Dalam pernyataan resmi peluncuran bursa kripto, Kepala Bappebti Kementerian Perdagangan Didid Noordiatmoko mengatakan bahwa regulasi yang diterbitkan terkait dengan pembentukan bursa kripto, telah melalui proses panjang.

Bappebti menerbitkan tiga aturan sekaligus yakni Keputusan Kepala Bappebti No. 01/BAPPEBTI/SP/BERKAS/07/2023 pada 17 Juli 2023 tentang Persetujuan Sebagai Bursa Berjangka Aset Kripto kepada PT Bursa Komoditi Nusantara.

Secara bersamaan, Bappebti juga menerbitkan Keputusan Kepala Bappebti No. 01/BAPPEBTI/SP/BERKAS/07/2023 tentang Persetujuan Sebagai Lembaga Klining Berjangka untuk Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto kepada PT Klining Berjangka Indonesia.

Bappebti juga mengatur pengelolaan dan tempat penyimpanan aset kripto melalui Keputusan Kepala Bappebti No. 01/BAPPEBTI/SP/BERKAS/07/2023 pada 20 Juli 2023 tentang Persetujuan Sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto kepada PT Tennen Depositary Indonesia.

Didid menyatakan pembentukan bursa, klining, dan pengelola penyimpanan aset kripto menjadi bukti pemenuhan hadir dalam menciptakan ekosistem perdagangan aset kripto yang wajar dan adil, termasuk dari sisi perlindungan

kepada masyarakat.

Dia menegaskan pembentukan bursa kripto dilakukan di masa transisi UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan

Penguatan Sektor Keuangan. Dalam pengembangan dan penguatan bursa, klining, dan pengelola penyimpanan aset kripto ke depannya, Bappebti tidak bekerja sendiri. Bappebti butuh kolaborasi dari kementerian/lembaga terkait, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan serta pemangku kepentingan masyarakat lainnya.

Industri dan perdagangan kripto ini dapat terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri," kata Didid.

Apalagi, transaksi kripto ditempatkan sebagai instrumen investasi dengan risiko tinggi.

"Sejalan dengan itu, aset kripto bisa mengalami peningkatan maupun penurunan nilai yang sangat drastis dalam waktu yang cepat. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang baik di masyarakat termasuk manfaat, potensi, dan risiko dari perdagangan aset kripto," katanya.

Jenis aset kripto yang banyak dipertandingkan antara lain Tether (USDT), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), dan Binance Coin (BNB).

Hanya saja, dibandingkan dengan awal-awal kripto perdagangan, nilai aset tersebut sudah turun jauh. Hal ini juga menjadi pekerjaan rumah sejalan dengan kehadiran bursa kripto yang lahir di saat tren harga kripto global susut.

DAYA TARIK

Kendati demikian, menurut Direktur Utama Tennen Depositary Eric Septian Wicaksono, pasar kripto masih memiliki daya tarik besar. Meski terjadi volatilitas harga dan risiko terkait dengan investasi kripto, banyak orang tertarik pada potensi keuntungan dengan nilai besar dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam

perkembangan teknologi dan tren pasar.

Saat melakukan uji kelayakan dan keputusan terhadap calon Komisioner OJK pada pertengahan Juli lalu, Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo menyatakan industri kripto merupakan salah satu inovasi dalam teknologi keuangan.

Industri itu berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi. Bahkan sistem keuangan kripto terus membesar dengan jumlah transaksi dan nasabahnya melebihi nasabah di bursa saham.

"Kami tahu bahwa kripto ini memiliki eksposur atau risiko terhadap stabilitas sistem keuangan cukup besar karena jumlah transaksinya dan jumlah nasabahnya melebihi nasabah yang di bursa saham. Jumlahnya sudah hampir mendekati Rp1.000 triliun.

Sehingga memang dari segi perlindungan konsumen, maupun juga dari segi pemanfaatan betul-betul harus dilakukan pengawasan dengan baik, termasuk *money laundering* dan terutama menjangkau tahun politik ini," kata Andreas.

Hanya saja, dia menuntikan aset kripto belum sepenuhnya didukung oleh regulasi yang kuat.

Oleh sebab itu, terpilihnya Anggota Dewan Komisioner OJK yang khusus sebagai Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, nantinya dapat sejalan dari aspek pengembangan industri kripto dan perlindungan konsumen.

Nantinya, Anggota Komisioner OJK yang bertugas mengawasi pengawasan terhadap industri kripto akan diemban oleh Hasan Fawzi. Rapat Paripurna DPR pada Kamis (13/7), telah menetapkan Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.

Hanya saja, menurut UU No. 4/2023, peralihan tugas pengurusan dan pengawasan aset keuangan digital yang didalamnya mencakup aset kripto dari Bappebti kepada OJK, harus dilakukan paling lambat 2 tahun setelah UU berlaku.

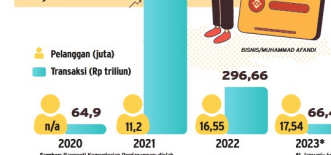
Peralihan tugas ini nantinya mengacu pada Peraturan Pemerintah yang mestinya sudah ditetapkan sejak 6 bulan setelah berlakunya undang-undang. Artinya, selepas industri kripto memiliki bursa tersendiri, investor masih perlu meraba-raba soal masa depan instrumen investasi ini ke depan setelah rampung transisi dari Bappebti ke OJK. ■

Sebagai sebuah industri yang tengah berkembang, hambatan ke depan seperti memastikan keamanan dan integritas platform, penyesuaian terhadap regulasi, pengetahuan pemilik dana dalam menarik dan mempertahankan investasinya, serta bersaing dalam pasar yang kompetitif, mesti diperhatikan.

Selain itu, bursa kripto juga harus beradaptasi dengan

Perdagangan Kripto di Indonesia

Kripto saat ini terus menjelma sebagai satu aset investasi di masyarakat, terutama kalangan generasi milenial. Tren perdagangan aset kripto tercatat sebagai berikut:



Perjalanan Regulasi Kripto

